

ABSTRACT

This paper examines the impact of Indonesia's Special Autonomy Status (SAS) of Papua, Aceh, and DKI Jakarta on employment probability across subgroups of personal and female characteristics. SAS is Indonesia's admission that accommodates a territory's need for modified/additional protections from the normal administration, and its core effect is the law of asymmetric fiscal decentralization. By using a probit difference-in-differences model with micro-level data of pooled cross-sections from the years 1990, 1995, and 2010, the analysis found that only Aceh and DKI Jakarta's SAS have statistically significant positive impacts on employment at a 5% significance level. By conducting the model regressions for subgroups (Males and Females; Married and Not Married; With Children and With No Children; Youth and Non-Youth; Below High School and High School & Beyond; Urban and Rural), all three regions' SAS increase female employment at the 5% level, but not for the male counterpart. Overall, DKI Jakarta's SAS has the most effective impact in increasing employment probability inclusively, both in subgroups of personal and female characteristics. Aceh's SAS has the most noticeable varying effects on female employment based on female characteristics.

Keywords: Special Autonomy; Female Employment; Probit; Difference-in-Differences; Indonesia; Papua; Aceh; DKI Jakarta

INTISARI

Penelitian ini mengkaji dampak status Otonomi Khusus dan Istimewa (Otsus) Indonesia di Papua, Aceh, dan DKI Jakarta terhadap peluang kerja di subkelompok-subkelompok berdasarkan karakteristik-karakteristik pribadi dan perempuan. Otsus adalah otonomi yang diberikan pemerintah Indonesia untuk wilayah yang membutuhkan perubahan/perindungan tambahan dari administrasi normal. Fitur inti status ini adalah desentralisasi fiskal asimetris. Dengan menggunakan model probit *difference-in-differences* dan data mikro *pooled cross sections* dari tahun 1990, 1995, dan 2010, analisis menemukan bahwa hanya otsus Aceh dan DKI Jakarta yang memiliki dampak yang signifikan terhadap peluang kerja di tingkat signifikansi 5%. Dengan melakukan regresi model untuk berbagai subkelompok (laki-laki & perempuan; status menikah & status tidak menikah; anak & tanpa anak; muda & tidak muda; lulus di bawah SMA & lulus SMA dan level di atasnya; perkotaan & pedesaan), ketiga otsus memiliki dampak positif untuk meningkatkan peluang kerja perempuan, tetapi tidak berdampak pada laki-laki. Secara keseluruhan, otsus DKI Jakarta memiliki dampak yang paling efektif dalam meningkatkan peluang kerja secara inklusif, baik di subkelompok karakteristik pribadi maupun karakteristik perempuan. Otsus Aceh mempunyai dampak yang paling bervariasi di peluang kerja perempuan berdasarkan karakteristik perempuan.

Kata Kunci: Otonomi Khusus; Peluang Kerja Perempuan; Probit; *Difference-in-Differences*; Indonesia; Papua; Aceh; DKI Jakarta